

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perempuan pesisir menjalankan peran ganda pada kehidupan bermasyarakat, yakni mengurus pekerjaan rumah tangga sekaligus terlibat pada kegiatan ekonomi di ruang publik. Sehingga mereka sering menghadapi beban kerja yang lebih berat dibandingkan oleh laki-laki. Kondisi ini sangat terlihat di Kelurahan Bagan Deli, Kecamatan Medan Belawan, ketika perempuan turut bekerja untuk menopang kebutuhan ekonomi keluarga. Lebih lanjut, keberadaan perempuan pesisir juga memiliki kontribusi penting terhadap menjaga keberlangsungan kehidupan rumah tangga dan komunitas. Ironisnya berbagai keterlibatan tersebut, peran perempuan sering kali tidak mendapatkan perhatian maupun penghargaan yang setara.

Fenomena ini menunjukkan bahwa perempuan pesisir memiliki potensi strategis dalam mempertahankan stabilitas sosial dan ekonomi keluarga. Mereka tidak hanya berperan sebagai ibu rumah tangga, tetapi juga sebagai penggerak ekonomi lokal dengan kegiatan seperti berdagang di wilayah pesisir untuk menambah pendapatan keluarga karena sumber penghasilan suami tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka (Hartati dkk., 2020). Perempuan pesisir di Bagan Deli juga menjalani berbagai pekerjaan seperti mengumpulkan kerang, mengolah hasil tangkapan ikan, membersihkan perahu yang baru tiba, mengumpulkan benih ikan (nener), membuat atau memperbaiki jaring, serta membuka warung sebagai sumber pendapatan tambahan.

Peran penting perempuan pesisir sering kali terpinggirkan akibat kuatnya budaya patriarki dan pandangan tradisional yang masih menempatkan perempuan sebagai pihak kedua setelah laki-laki. Kondisi ini berdampak pada terbatasnya ruang bagi perempuan pesisir untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan, baik dalam keluarga maupun di ranah publik. Pada konteks rumah tangga nelayan, keputusan strategis seperti penggunaan hasil tangkapan, pembagaian kerja hingga pengelolaan ekonomi keluarga umumnya masih didominasi oleh laki-laki. Sementara itu, perempuan sering kali hanya berperan sebagai pelaksana keputusan yang telah ditetapkan tanpa memberikan kesempatan mereka dalam memberikan pendapat atau menentukan arah keputusan tersebut.

Penelitian Nurholis dan Rochana (2018) mengungkapkan keterbatasan perempuan dalam pengambilan keputusan dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain: rendahnya tingkat pendidikan formal, kurangnya akses terhadap informasi dan pelatihan, serta dipengaruhi oleh sistem nilai patriarki yang masih kuat. Mereka sering dianggap tidak memiliki kapasitas untuk menentukan arah kebijakan, baik dalam keluarga maupun komunitas. Penelitian ini juga menekankan bahwa rendahnya representasi perempuan dalam forum-forum musyawarah menyebabkan kebutuhan dan perspektif perempuan jarang terakomodasi dalam program pembangunan pesisir.

Pada kehidupan sosial dan ekonomi perempuan pesisir juga menghadapi berbagai tantangan yang kompleks. Kelurahan Bagan Deli, yang terletak di Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan, merupakan salah satu kawasan pesisir dengan tingkat kesejahteraan masyarakat yang masih rendah (Syafitri, 2019).

Sebagian besar penduduknya bekerja sebagai nelayan yang penghasilannya sangat bergantung pada kondisi cuaca dan musim. Ketika cuaca buruk, hasil tangkapan berkurang sehingga ekonomi keluarga menjadi tidak stabil. Pada kondisi ini, perempuan pesisir menjadi kelompok yang rentan dan sering terpinggirkan terhadap berbagai aspek kehidupan sosial dan ekonomi.

Perempuan pesisir juga menghadapi keterbatasan akses terhadap fasilitas kesehatan dan kesejahteraan sosial. Minimnya layanan kesehatan reproduksi, keterbatasan fasilitas kesehatan di daerah pesisir, serta kurangnya informasi mengenai kesehatan ibu dan anak menjadi faktor yang memperburuk kondisi mereka. Jauhnya jarak antara pemukiman dengan pusat kesehatan menyebabkan perempuan pesisir sering kali menunda pemeriksaan kehamilan atau merawatan media karena terkendala transportasi dan biaya. Pada sisi lain, rendahnya tingkat pendidikan dan minimnya pengetahuan mengenai kesehatan reproduksi menyebabkan perempuan pesisir kurang memahami pentingnya pemeriksaan kehamilan, imunisasi anak, dan penerapan pola hidup bersih. Hal ini memperkuat siklus kerentanan yang membuat perempuan pesisir berada dalam posisi yang lemah baik secara kesehatan maupun sosial.

Penelitian Sari dkk. (2022) menemukan bahwa kurangnya fasilitas kesehatan di daerah pesisir berdampak pada rendahnya tingkat kesehatan ibu dan anak yang masih rendah, disertai dengan tingginya angka kematian saat proses persalinan. Sementara itu, Utami dkk. (2019) menambahkan bahwa faktor lingkungan, seperti sanitasi yang buruk dan keterbatasan air bersih, dan kebiasaan hidup yang tidak higienis semakin memperburuk kondisi kesehatan perempuan

pesisir. Lingkungan tempat tinggal yang padat dan berdekatan dengan area pelabuhan atau tempat pembuangan limbah laut juga menimbulkan risiko penyakit kulit, infeksi, serta gangguan pernapasan.

Meskipun memiliki peran penting pada ekonomi pesisir, keberadaan perempuan pesisir belum sepenuhnya diakui oleh regulasi nasional Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 menitikberatkan pada upaya perlindungan serta peningkatan kesejahteraan juga kapasitas nelayan, tetapi belum mengakomodasi peran perempuan pesisir. Definisi “nelayan” masih terbatas pada laki-laki sebagai pihak yang secara langsung melakukan aktivitas penangkap ikan, sementara itu perempuan yang juga ikut melaut hanya diposisikan sebagai pendamping suami. Hal ini mengakibatkan perempuan pesisir harus menanggung risiko kecelakaan kerja tanpa perlindungan yang memadai (Afifah, 2023). Keterbatasan pengakuan formal terhadap status mereka sebagai pelaku ekonomi pesisir juga berdampak pada minimnya akses terhadap program bantuan pemerintah, seperti subsidi alat tangkap, pelatihan kewirausahaan maupun akses permodalan.

Keterbatasan akses terhadap pendidikan dan pelatihan keterampilan juga menjadi tantangan utama bagi perempuan pesisir untuk meningkatkan kesejahteraan. Mayoritas dari mereka hanya menempuh pendidikan hingga tingkat sekolah dasar atau menengah pertama, yang berdampak pada minimnya peluang kerja dan ketidakberdayaan untuk menghadapi perubahan sosial serta ekonomi (Febrianty, 2023). Sebagai kelompok yang memiliki tanggung jawab besar pada keluarga, perempuan pesisir rentan mengalami tekanan psikologis akibat beban ganda yang mereka pikul, baik terhadap aspek domestik maupun ekonomi. Budaya

patriarki yang masih kuat di masyarakat pesisir juga membatasi keterlibatan perempuan untuk menentukan arah dan keputusan penting pada kehidupan keluarga maupun komunitas. Keputusan suami dianggap lebih dominan, sehingga perempuan pesisir kerap hanya mengikuti keputusan yang diambil oleh suaminya (Afifah, 2023).

Penelitian menunjukkan bahwa perempuan pesisir memiliki kontribusi signifikan terhadap perekonomian lokal, namun sering kali menghadapi diskriminasi gender terhadap akses terhadap sumber daya dan pelatihan keterampilan (Astuti dkk., 2020). Studi lain mengungkapkan bahwa ketidaksetaraan gender di sektor perikanan menyebabkan perempuan pesisir mengalami kesulitan untuk mendapatkan akses modal, alat tangkap, dan jaringan pemasaran yang lebih luas (Hermawan dkk., 2023). Hal ini menunjukkan bahwa tanpa adanya tindakan yang tepat, perempuan pesisir akan terus berada dalam siklus kemiskinan yang sulit diputus.

Untuk mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi, pemberdayaan perempuan pesisir menjadi langkah strategis dalam meningkatkan kesejahteraan dan meningkatkan partisipasi perempuan pesisir. Menurut Zakiyah (2021), pemberdayaan perempuan menjadi kunci utama dalam mengembangkan peran dan potensi mereka agar lebih mandiri sehingga dapat lebih mandiri dalam kegiatan ekonomi dan kehidupan sosial. Proses pemberdayaan ini mencakup tiga langkah penting. Pertama, menghapus anggapan bahwa perempuan hanya sebagai pelengkap dalam rumah tangga, dengan menegaskan bahwa perempuan memiliki kapasitas yang sama untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi dan sosial.

Kedua, memberikan keterampilan yang relevan bagi perempuan; dan ketiga, membuka akses seluas-luasnya terhadap pendidikan dan pelatihan.

Adanya pemberian akses, pengetahuan, keterampilan, serta sumber daya, perempuan pesisir dapat lebih aktif dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga dan masyarakat. Kamuli dkk., (2023) menegaskan bahwa pemberdayaan yang berbasis pada potensi lokal tidak hanya memperkuat kemandirian ekonomi perempuan, tetapi juga mendorong transformasi sosial menuju kesetaraan gender di wilayah pesisir. Selain itu, pendekatan partisipatif dalam kegiatan pemberdayaan juga penting untuk memastikan bahwa setiap perempuan terlibat secara langsung dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan program.

Ada banyak kajian pemberdayaan perempuan pesisir, peneliti mengelompokkan ke dalam 3 bagian. Pertama, kajian pemberdayaan perempuan pesisir dari aspek ekonomi seperti yang dilakukan Koesrianti dkk (2024), Adam dkk (2023), Dewi dkk (2023), Anam (2023), Sumarni (2022), Nurfadila dkk (2022), Hartati dkk (2020), Hamzah (2019), Juliana dan Koniyo (2019), Adiwaty dkk (2019) serta penelitian lainnya. Penelitian yang dilakukan Koesrianti dkk (2024) memperlihatkan bahwa keterlibatan perempuan sangat penting dalam kegiatan ekonomi produktif untuk mengelola sumber daya pesisir. Namun rendahnya tingkat pendidikan dan minimnya pembinaan dapat dijadikan alasan minimnya peran serta perempuan dalam usaha-usaha produktif. Potensi lokal di wilayah pesisir dapat dioptimalkan untuk meningkatkan kesejahteraan perempuan pesisir dengan dilakukan pemberdayaan perempuan.

Kedua kajian mengenai pemberdayaan perempuan melalui bahan-bahan tidak terpakai atau limbah seperti pada penelitian oleh Sari dkk (2022), Jumiaty dkk (2020), Butarbutar dkk (2020). Yuningsi dkk (2021) Penelitian Butarbutar (2020) menunjukkan bahwa Peran perempuan di wilayah pesisir dapat diperkuat dan dikembangkan sebagai motor penggerak dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Mereka memiliki potensi besar dalam mengoptimalkan sumber daya manusia serta meningkatkan keterampilan, terutama dalam mengolah dan mengembangkan produk kerajinan berbasis limbah perikanan agar memiliki nilai jual tinggi sesuai dengan permintaan pasar. Lebih lanjut, perempuan pesisir juga dapat berperan dalam menciptakan inovasi produk, memperluas jaringan pemasaran, serta membangun kesadaran akan pentingnya pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, mereka tidak hanya berkontribusi dalam peningkatan ekonomi keluarga, tetapi juga membantu menciptakan ekosistem ekonomi yang lebih tangguh dan mandiri di komunitas pesisir, sekaligus mengatasi berbagai tantangan yang dapat menghambat pertumbuhan ekonomi masyarakat pesisir.

Ketiga mengenai kajian pemberdayaan perempuan melalui peran pemerintah LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) dan komunitas sosial. Seperti pada penelitian Musyanti dkk (2024), Wattimena dkk (2024), Kamuli dkk (2023), Safrida (2022), Mirawati dan Hajad (2022) dan penelitian-penelitian lainnya. Penelitian yang dilakukan oleh Wattimena dkk (2024) hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pemerintah sangat berperan dalam memberikan advokasi, pelatihan, serta bantuan dalam pemberdayaan perempuan pesisir. Peran tersebut

sangat penting dalam proses pemberdayaan perempuan pesisir. Pada konteks ini, KNTI sebagai komunitas nelayan yang berfokus pada pemberdayaan nelayan tradisional Indonesia telah aktif dalam mengorganisasikan perempuan nelayan.

Berangkat dari berbagai persoalan yang dihadapi oleh perempuan pesisir bahwa perempuan memiliki peran penting dalam setor kelautan. Namun, pada kenyataannya perempuan pesisir sering kali tidak mendapatkan pengakuan, akses, dan perlindungan hukum yang setara dengan laki-laki. Menyadari ketimpangan tersebut, Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) mengambil inisiatif untuk mendorong dan memfasilitasi terbentuknya komunitas atau organisasi yang dapat menjadi wadah aspirasi serta memperjuangkan hak-hak perempuan pesisir.

Proses pembentukan KPPI diawali melalui forum diskusi kelompok yang melibatkan perempuan-perempuan pesisir dari berbagai daerah, seperti: Provinsi Nusa Tenggara Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Sumatera Utara, dan Aceh. Pada forum tersebut, para peserta saling berbagi pengalaman, tantangan, serta merumuskan solusi atas permasalahan yang dihadapi di wilayah masing-masing. Rangkaian diskusi dan pertukaran gagasan tersebut, kemudian lahir komitmen bersama untuk membentuk sebuah organisasi khusus perempuan nelayan yang kemudian diberi nama Kesatuan Perempuan Pesisir Indonesia (KPPI).

Istilah perempuan pesisir dipilih karena cakupan profesi yang lebih luas, tidak hanya merujuk pada istri nelayan, tetapi juga mencakup perempuan yang berperan langsung sebagai penangkap, pengolah, dan pemasar hasil laut, baik tangkapan maupun budidaya, serta mereka yang terlibat dalam berbagai pekerjaan pendukung sektor kelautan di wilayah pesisir. KPPI menegaskan peran strategis

perempuan dalam sistem ekonomi keluarga nelayan dan sebagai agen perubahan yang memperjuangkan hak-hak perempuan, kesetaraan gender, serta keadilan ekologis (Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia, n.d).

Kesatuan Perempuan Pesisir Indonesia (KPPI) hadir sebagai wadah yang berperan dalam mewujudkan kesejahteraan perempuan pesisir secara adil, baik dari aspek ekonomi, dan sosial masyarakat. Sejak didirikan pada 5 Juli 2020 dengan jumlah awal sebanyak 50 anggota perempuan, KPPI telah mengalami pertumbuhan signifikan hingga mencapai 824 anggota yang tersebar di 17 Dewan Pimpinan Daerah (DPD) di lima provinsi, yaitu Nusa Tenggara Barat, Sumatera Utara, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Kesatuan Perempuan Pesisir Indonesia, n.d).

Lahirnya KPPI di Medan berawal dari keterlibatan Nilawati, salah satu perempuan pesisir yang aktif dalam berbagai kegiatan pelatihan dan forum yang diselenggarakan oleh KTNI. Melalui keterlibatannya dalam kegiatan tersebut, Nilawati mulai menyadari pentingnya peran perempuan dalam proses kerja nelayan dan kontribusi mereka terhadap ekonomi keluarga. Kesadaran inilah yang kemudian mendorongnya untuk memelopori pembentukan KPPI di wilayah Medan. Saat ini Nilawati menjadi ketua KPPI di Bagan Deli, Medan Belawan. Yang sekretariatnya berada di Jl. Ujung Tanjung Lingkungan 05 Bagan Deli. Keberadaan KPPI dengan anggota sebanyak 150 orang. Pada hal ini KPPI sebagai wadah yang berperan dalam mewujudkan kesejahteraan perempuan pesisir dan meningkatkan peran perempuan dalam mengambil keputusan.

Penelitian ini memiliki perbedaan dari studi-studi terdahulu, dengan menghadirkan unsur kebaruan yang terletak pada penekanan fokus kajian secara

lebih mendalam terhadap peran Kesatuan Perempuan Pesisir Indonesia (KPPI) sebagai agen perubahan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan dan partisipasi perempuan pesisir dalam pengambilan keputusan di wilayah Bagan Deli, Medan Belawan. Meski pada penelitian sebelumnya sudah membahas bagaimana strategi pemberdayaan perempuan pesisir pada komunitas atau organisasi, namun fokus komunitas atau organisasi yang dibahas kali ini berbeda yaitu Kesatuan Perempuan Pesisir Indonesia (KPPI).

Penelitian ini sangat penting dilakukan karena perempuan pesisir merupakan kelompok yang menghadapi keterbatasan signifikan dalam aspek sosial dan ekonomi. Akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan pelatihan keterampilan yang terbatas membuat mereka sulit meningkatkan kualitas hidup dan kemandirian ekonomi. Pada sisi lain, keterlibatan perempuan dalam proses pengambilan keputusan, baik di tingkat keluarga maupun komunitas, masih sangat minim. Padahal, mereka memiliki peran vital dalam menopang ekonomi rumah tangga melalui aktivitas produktif seperti pengolahan hasil laut, perdagangan kecil, dan usaha rumah tangga lainnya. Kurangnya pengakuan formal terhadap kontribusi tersebut dalam kebijakan publik menjadikan posisi perempuan pesisir semakin rentan. Oleh karena itu, pemberdayaan sosial dan ekonomi menjadi kunci strategis untuk meningkatkan partisipasi aktif, mengurangi ketimpangan gender, serta memperkuat kapasitas perempuan pesisir dalam membangun kehidupan yang lebih mandiri dan sejahtera.

Melalui penelitian ini, peran Kesatuan Perempuan Pesisir Indonesia (KPPI) dapat dikaji secara mendalam sebagai agen perubahan yang berupaya mendorong

pemberdayaan perempuan pesisir secara berkelanjutan. Urgensi penelitian ini terletak pada pentingnya mengembangkan strategi pemberdayaan berbasis komunitas yang lebih efektif untuk meningkatkan kesejahteraan perempuan pesisir dan peran perempuan terhadap pengambilan keputusan. Berdasarkan pemahaman atas dinamika sosial budaya yang mempengaruhi perempuan pesisir, penelitian ini dapat memberikan rekomendasi praktis bagi organisasi perempuan pemerintah dalam merancang program pemberdayaan yang lebih tepat sasaran. Harapannya, hasil penelitian ini dapat menjadi dasar dalam pengambilan kebijakan yang lebih inklusif bagi perempuan pesisir, sehingga mereka dapat lebih mandiri dan berdaya dalam menghadapi tantangan kehidupan di Bagan Deli, Medan Belawan.

1.2 Rumusan Masalah

Merujuk pada pemaparan di atas, sehingga dapat di ambil rumusan masalah berikut ini:

1. Bagaimana peran Kesatuan Perempuan Pesisir Indonesia (KPPI) dalam meningkatkan kesejahteraan dan partisipasi perempuan pesisir pada pengambilan keputusan di Bagan Deli, Belawan?
2. Apa saja strategi yang diterapkan KPPI dalam meningkatkan kesejahteraan dan partisipasi perempuan pesisir dalam pengambilan keputusan di Bagan Deli, Belawan?
3. Apa hambatan yang dihadapi KPPI dalam pelaksanaan program peningkatan kesejahteraan dan pengambilan keputusan perempuan pesisir di Bagan Deli, Belawan, serta bagaimana upaya yang dilakukan untuk mengatasinya?

1.3 Tujuan Penelitian

Sehubung terkait rumusan masalah yang sudah dikemukakan, Adapun tujuan penelitian tersebut dapat dirumuskan seperti berikut:

1. Untuk menganalisis peran Kesatuan Perempuan Pesisir Indonesia (KPPI) dalam meningkatkan kesejahteraan dan partisipasi perempuan pesisir pada pengambilan keputusan di Bagan Deli Belawan.
2. Untuk menganalisis strategi yang diterapkan KPPI dalam meningkatkan kesejahteraan dan partisipasi perempuan pesisir dalam pengambilan Keputusan di Bagan Deli Belawan.
3. Untuk menganalisis hambatan yang dihadapi KPPI dalam menjalankan program peningkatan kesejahteraan dan partisipasi perempuan pesisir dalam pengambilan keputusan di Bagan Deli Belawan, serta upaya yang dilakukan untuk mengatasinya.

1.4 Manfaat Penelitian

Harapannya penelitian tersebut bisa berkontribusi yang bermanfaat, baik dari segi teori ataupun praktik.

1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Melalui penelitian ini, harapannya mampu memberi wawasan serta perspektif baru pada kajian Antropologi Gender.
2. Harapannya penelitian tersebut bisa sebagai refrensi bagi mahasiswa serta memberi sumbangan terhadap pengembangan teori pemberdayaan.

3. Penelitian ini diharapkan menjadi wadah referensi, menambah ilmu dan pengetahuan mengenai pemberdayaan perempuan pesisir dalam penelitian selanjutnya.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Melalui penelitian tersebut, diharapkan dapat memberi manfaat terhadap Pemerintah dalam menyusun strategi pemberdayaan yang lebih efisien dan berkelanjutan untuk perempuan yang tinggal di wilayah pesisir. Serta membantu KPPI dalam meningkatkan strategi dan program mereka agar lebih optimal dalam memberdayakan pada perempuan pesisir di Bagan Deli secara berkelanjutan.
2. Melalui penelitian ini, harapannya bisa mengsumbangsi pengetahuan yang lebih mendalam kepada masyarakat agar lebih mengenal komunitas Kesatuan Perempuan Pesisir Indonesia (KPPI) secara mendalam.